



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Catatan Pansus Jadi Keputusan DPRD Kota Jogja

Rekomendasi Tak Dijalankan, Kembalikan PKL Malioboro ke Lokasi Lama

Setelah bekerja beberapa waktu, DPRD Kota Jogja berhasil membuat sejumlah catatan dan rekomendasi atas relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Itu merupakan hasil kerja panitia khusus (pansus) yang dibentuk dewan. Selanjutnya, semua catatan dan rekomendasi itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Jogja No. 15/Kep/DPRD/VII/2022.



Kami mendukung Kawasan Malioboro sebagai Sumbu Filosofi yang diusulkan ke Unesco sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia."

M. FURSAN
Wakil Ketua DPRD Kota Jogja

"KEPUTUSAN itu kami harapkan ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M. Fursan kemarin (27/7).

Sebelum sampai pada rekomendasi, Fursan menjelaskan latar belakang pembentukan pansus. Dengan adanya pansus, dewan ingin mengetahui lebih jauh konsep relokasi PKL Malioboro. Bukan menolak kebijakan Pemda DIY merelokasi dan mendampingi PKL dan pemangku kepentingan ekonomi di Malioboro mendapatkan hak-haknya sesuai konstitusi.

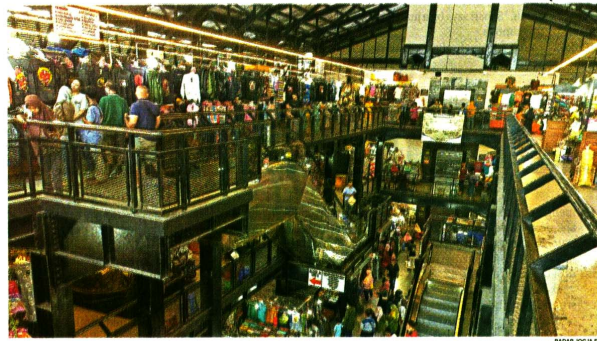
"Kami mendukung Kawasan Malioboro sebagai Sumbu Filosofi yang diusulkan ke Unesco sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia," katanya.

Meski begitu, dewan ingin PKL Malioboro yang menempati lahan baru Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 tetap terjamin keberlangsungan usahanya. Teras Malioboro 1 menempati eks Bioskop Indra. Sedangkan Teras Malioboro 2 berlokasi di bekas gedung Dinas Pariwisata DIY.

Pengelolaan Teras Malioboro 1 di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sedangkan Teras Malioboro 2 dikelola UPT Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja dan Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Dinas Kebudayaan DIY.

Selanjutnya dalam rekomendasinya, Fursan menjelaskan, pengelolaan Teras Malioboro 2 diharapkan tetap menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Jogja. "Pertimbangannya supaya bisa lebih fokus dalam rangka pemberdayaan dan penguatan perekonomian sesuai tugas pokok fungsi yang diemban," ungkap Fursan.

Pemerintah diminta dapat melakukan pendampingan bagi PKL Malioboro. Sebab,



NAIK KELAS: PKL Malioboro setelah direlokasi menempati Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Lahan yang ditempati bukan lagi lapak tapi tenan.

usai pindah ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 sebutannya berubah menjadi tenan. Bukan lagi lapak. "Pendampingan itu agar PKL bisa beradaptasi di lokasi yang baru dan dapat meningkatkan kualitas produk yang menarik pengunjung," kata wakil rakyat yang tinggal di Kauman, Jogja ini.

Pansus merekomendasikan agar mendorong gerobak diberikan tawaran pekerjaan alternatif. Misalnya sebagai petugas kebersihan di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 ada yang tercecer, menjadi kewajiban pemerintah dicarikan solusi terbaik. "Sesuai konstitusi mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak warga negara,"

ingatnya.

Bagi pedagang asongan yang terdampak akibat kebijakan relokasi agar diperbolehkan berjualan kembali dengan sejumlah syarat. Jumlahnya dibatasi, memakai pakaian adat dan jenis dagangannya dibatasi. Yakni hanya sebatas minuman dan bukan jenis oleh-oleh. Pelaku seni yang menggantungkan hidupnya di Kawasan Malioboro agar diberikan ruang melakukan aktivitas seni yang selama ini digeluti sebagai mata pencaharian. Pemerintah diharapkan dapat mengatur lalu lintas pengguna parkir, becak, dan andong di wilayah Malioboro.

Di samping itu, pemerintah perlu mengevaluasi titik lokasi pedagang agar sesuai dengan peruntukannya. Bila perlu dibuat peta jalur pengunjung agar persebarannya

lebih merata. Selanjutnya, dewan mendesak pemerintah menyelidiki dugaan oknum yang melakukan pungutan liar yang merugikan PKL Malioboro dan meniadak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Akses pintu masuk di sisi Timur Teras Malioboro 2 di Jalan Perwakilan diharapkan bisa dibuka demi mempermudah akses pengunjung.

Fursan mewanti-wanti bila etatan dan rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan serius dan diimplementasikan, PKL Malioboro yang sudah direlokasi di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 agar dikembalikan ke kawasan pedestrian Malioboro. "Kembalikan ke lokasi yang lama yang sebelumnya mereka tempati," tandasnya. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005